**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *SMART CITY* DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh**

**Fajar Rizky Ananta**

**(2416041070)**

**Reguler C**

****

**ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG**

**2025**

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Landasan Teori**

**2.1.1 Konsep Smart City**

Konsep *smart city* lahir sebagai jawaban atas meningkatnya kompleksitas permasalahan perkotaan akibat urbanisasi. Penerapan smart city tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), tetapi juga dengan integrasi aspek sosial, ekonomi, tata kelola, dan lingkungan. Menurut Giffinger dkk. (2007), terdapat enam dimensi utama smart city, yaitu *smart economy, smart people, smart governance, smart mobility, smart environment,* dan *smart living*. Keenam dimensi tersebut menekankan keterhubungan antara teknologi dan manusia dalam menciptakan kota yang adaptif dan efisien. Dengan demikian, smart city dipahami sebagai strategi kebijakan publik yang menggabungkan teknologi, kolaborasi multiaktor, serta keberlanjutan.

Program *Gerakan 100 Smart City* yang diluncurkan pemerintah sejak 2017 mendorong banyak kota di Indonesia untuk mengadopsi inovasi digital. Kota Bandar Lampung termasuk salah satu yang ikut serta dalam program ini dan telah melakukan beberapa inisiatif awal. Penelitian Putri dan Kurniati (2025) menunjukkan bahwa implementasi smart city di Bandar Lampung terlihat pada bidang lingkungan, seperti *smart waste management* dan pemantauan kualitas udara berbasis IoT. Meski demikian, keterbatasan infrastruktur dan rendahnya partisipasi masyarakat menjadi kendala utama. Oleh karena itu, pengembangan smart city perlu dipandang sebagai proses jangka panjang yang membutuhkan dukungan regulasi, teknologi, dan partisipasi publik.

**2.1.2 Kebijakan Publik**

Kebijakan publik adalah instrumen utama pemerintah dalam menangani masalah kolektif masyarakat. Dunn (2018) menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang dibuat pemerintah untuk memecahkan masalah publik dengan konsekuensi luas. Proses kebijakan publik mencakup tahap formulasi, implementasi, dan evaluasi (Subarsono, 2016). Dari ketiga tahapan tersebut, implementasi sering dianggap sebagai fase paling krusial karena menentukan keberhasilan kebijakan dalam praktik. Dengan demikian, efektivitas implementasi akan sangat memengaruhi tercapainya tujuan kebijakan.

Dalam konteks smart city, implementasi kebijakan sangat penting karena menyangkut integrasi program digital dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah perlu menyiapkan regulasi yang jelas, koordinasi antarinstansi yang efektif, serta alokasi anggaran yang memadai. Selain itu, kesiapan sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat menjadi faktor yang tidak kalah penting. Jika salah satu unsur ini lemah, kebijakan smart city berisiko berjalan tidak optimal. Oleh karena itu, strategi implementasi yang terukur dan inklusif sangat diperlukan agar kebijakan dapat menghasilkan dampak nyata.

**2.1.3 Smart Governance dan Pelayanan Publik Digital**

Smart governance merupakan salah satu dimensi utama smart city yang menekankan pemanfaatan teknologi digital untuk menciptakan tata kelola publik yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif. Menurut Meutia (2021), smart governance bukan hanya sekadar digitalisasi prosedur birokrasi, tetapi juga transformasi hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Melalui digitalisasi, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi pelayanan sekaligus membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas. Hal ini menjadikan smart governance sebagai pilar penting dalam pembangunan kota cerdas.

Pelayanan publik digital menjadi wujud nyata dari penerapan smart governance di tingkat daerah. Digitalisasi memungkinkan penyederhanaan prosedur birokrasi, pemangkasan waktu pelayanan, serta peningkatan akuntabilitas aparatur. Penelitian Priyowidodo, Indrayani, dan Yogatama (2024) di Kota Surabaya menunjukkan bahwa penerapan layanan digital berhasil meningkatkan transparansi sekaligus memperkuat interaksi warga dengan pemerintah. Hasil ini memperlihatkan bahwa layanan berbasis digital bukan hanya inovasi teknis, melainkan bagian dari tata kelola publik yang lebih modern. Dengan demikian, smart governance berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan responsif.

**2.1.4 Tata Kelola Pemerintahan Daerah dalam Smart City**

Prinsip *good governance* menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan smart city di tingkat daerah. UNDP (2015) menegaskan bahwa transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi merupakan komponen pokok dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Penerapan smart city diharapkan dapat memperkuat prinsip-prinsip tersebut melalui pemanfaatan teknologi digital. Dengan begitu, kualitas tata kelola pemerintahan daerah dapat meningkat dan lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam kasus Bandar Lampung, penelitian Putri dan Kurniati (2025) memperlihatkan bahwa penerapan smart city sudah berjalan terutama di bidang lingkungan. Program seperti smart waste management dan pemantauan kualitas udara telah dilaksanakan dengan bantuan teknologi IoT. Namun, keterbatasan anggaran, infrastruktur, dan koordinasi antarinstansi masih menjadi hambatan utama. Kondisi ini menunjukkan perlunya strategi tata kelola yang lebih inklusif dan terintegrasi. Oleh karena itu, implementasi smart city membutuhkan penguatan kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat.

**2.2 Penelitian Terdahulu**

| **No** | **Peneliti & Tahun** | **Lokasi** | **Fokus Penelitian** | **Temuan Utama** | **Relevansi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Putri & Kurniati (2025) | Bandar Lampung | Smart city & lingkungan | Implementasi smart waste management, pemantauan udara; kendala infrastruktur & partisipasi | Memberikan gambaran awal implementasi smart city di Bandar Lampung |
| 2 | Priyowidodo, Indrayani, & Yogatama (2024) | Surabaya | Smart governance | Digitalisasi layanan publik meningkatkan transparansi & interaksi warga | Relevan untuk dimensi smart governance |
| 3 | Triyanto, Kismartini, Purnaweni, & Luqman (2024) | Semarang | Smart governance | Tantangan koordinasi antarinstansi; perlunya integrasi kebijakan | Memberikan pembanding model governance |
| 4 | Setiawan & Aindita (2022) | Semarang | Kebijakan smart city | Kebijakan daerah perlu kejelasan regulasi dan SDM | Relevan untuk analisis kebijakan |
| 5 | Handayani, Syafarudin, & Muflihah (2023) | Bandar Lampung | Realisasi kebijakan smart city | Tantangan implementasi kebijakan di level daerah | Langsung terkait penelitian ini |
| 6 | Kurniawan & Triloka (2023) | Bandar Lampung | Evaluasi TI (COBIT 5) | Evaluasi IT governance Bapenda | Memberi perspektif teknis tata kelola TI |
| 7 | Kusnadi (2025) | Bandar Lampung | Implementasi smart city pasca evaluasi tahap I | Smart City dinyatakan berhasil pada enam dimensi; kendala pada anggaran, SDM, koordinasi OPD | Data terbaru & langsung menguatkan penelitian ini |

Penelitian terdahulu di atas menunjukkan bahwa banyak studi berfokus pada aspek teknis, seperti pengelolaan lingkungan, digitalisasi layanan, dan tata kelola teknologi informasi. Namun, kajian yang menyoroti analisis kebijakan smart city di Kota Bandar Lampung secara komprehensif masih terbatas. Hal ini menegaskan adanya *research gap* yang penting untuk diteliti lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk memberikan kontribusi akademik sekaligus masukan praktis bagi pemerintah daerah.

**2.3 Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dibangun berdasarkan teori kebijakan publik, konsep smart city, serta prinsip smart governance. Teori kebijakan publik menjelaskan bahwa implementasi merupakan tahap penting yang menentukan apakah suatu kebijakan mampu mencapai tujuannya (Subarsono, 2016). Dalam konteks ini, implementasi kebijakan smart city dipandang sebagai faktor kunci yang dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Dengan kata lain, hubungan antara kebijakan smart city dan kualitas tata kelola bersifat kausal dan perlu diuji secara empiris.

Variabel independen (X) dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan smart city yang mencakup beberapa indikator. Indikator tersebut meliputi keberadaan regulasi daerah, kesiapan infrastruktur digital, kualitas sumber daya manusia, serta tingkat partisipasi masyarakat. Aspek-aspek ini dipilih karena merupakan faktor penentu keberhasilan program smart city di berbagai daerah (Putri & Kurniati, 2025). Apabila implementasi pada aspek tersebut berjalan baik, maka kebijakan smart city diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sementara itu, variabel dependen (Y) adalah kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Variabel ini diukur dengan menggunakan prinsip-prinsip *good governance* yang meliputi transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan responsivitas (UNDP, 2015). Transparansi menekankan pada keterbukaan informasi publik, efisiensi berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya secara optimal, akuntabilitas menyangkut pertanggungjawaban kinerja pemerintah, dan responsivitas merujuk pada kemampuan pemerintah menanggapi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kualitas tata kelola pemerintahan daerah dapat dilihat sebagai hasil langsung dari efektivitas implementasi smart city.

Hubungan antarvariabel tersebut menunjukkan adanya asumsi teoritis bahwa semakin baik implementasi kebijakan smart city, semakin tinggi pula kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Sebaliknya, jika implementasi lemah, maka kualitas tata kelola akan menurun dan berdampak pada berkurangnya kepercayaan publik. Berdasarkan kerangka berpikir ini, penelitian berusaha menguji secara kuantitatif hubungan antara implementasi kebijakan smart city (X) dengan kualitas tata kelola pemerintahan daerah (Y) di Kota Bandar Lampung. Dengan cara ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas kebijakan smart city dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan di tingkat lokal.

Implementasi Kebijakan Smart City (X)

───────────────►

Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah (Y)

**2.4 Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan kerangka berpikir, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut.

* **H0:** Tidak terdapat hubungan signifikan antara implementasi kebijakan smart city dengan kualitas tata kelola pemerintahan daerah di Kota Bandar Lampung.
* **H1:** Terdapat hubungan signifikan antara implementasi kebijakan smart city dengan kualitas tata kelola pemerintahan daerah di Kota Bandar Lampung.

**Daftar Referensi**

Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.

Giffinger, R., Fertner, C., Kramar, H., Kalasek, R., Pichler-Milanovic, N., & Meijers, E. (2007). *Smart cities: Ranking of European medium-sized cities*. Centre of Regional Science, Vienna University of Technology.

Handayani, D. W., Syafarudin, & Muflihah, L. (2023). Problem realisasi kebijakan smart city di Indonesia: Kasus Kota Bandar Lampung. *JISPO, 13*(1), 56–72. [https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jispo/article/view/10765](https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jispo/article/view/10765?utm_source=chatgpt.com)

Kusnadi, N. B. (2025). Implementasi smart city di Kota Bandar Lampung pasca evaluasi tahap I tahun 2024 (Skripsi, Universitas Lampung). Universitas Lampung.

Kurniawan, A., & Triloka, J. (2023). Evaluasi tata kelola teknologi informasi pada Bapenda Kota Bandar Lampung menggunakan framework COBIT 5 dan balanced scorecard. JUPITER, 15(2), 101–112. [https://jurnal.polsri.ac.id/index.php/jupiter/article/view/9112](https://jurnal.polsri.ac.id/index.php/jupiter/article/view/9112?utm_source=chatgpt.com)

Meutia, I. F. (2021). Manajemen publik dan smart governance di Indonesia. Prenada Media.

Priyowidodo, G., Indrayani, I. I., & Yogatama, A. (2024). Smart government-based governance through digital transformation of public services: Experience of Surabaya city government, Indonesia. PERSPEKTIF, 13(4), 1501–1510. [https://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif/article/view/12001](https://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif/article/view/12001?utm_source=chatgpt.com)

Putri, S. R., & Kurniati, E. (2025). Peran smart city dalam pengelolaan lingkungan perkotaan: Studi kasus implementasi di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Bersama Ilmu Ekonomi, 1*(1), 21–29. <https://doi.org/10.55123/ekonom.v1i1.29>

Setiawan, I., & Aindita, E. T. F. (2022). Kebijakan smart city dalam penerapan sistem pemerintahan di Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, 14*(1), 11–20. [https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/2726](https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/2726?utm_source=chatgpt.com)

Subarsono, A. (2016). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori, dan aplikasi*. Pustaka Pelajar.

Triyanto, D., Kismartini, Purnaweni, H., & Luqman, Y. (2024). Analisis penerapan smart governance di Kota Semarang. *PERSPEKTIF, 13*(2), 567–578. [https://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif/article/view/10817](https://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif/article/view/10817?utm_source=chatgpt.com)

UNDP. (2015). *Good governance and sustainable human development*. United Nations Development Programme.